

Problematika Penumpukan Realisasi Anggaran di Akhir Tahun (Studi Kasus di IAIN Sultan Amai Gorontalo)

Sri Dewi Yusuf
IAIN Sultan Amai Gorontalo
sridewiyusuf@iaingorontalo.ac.id

Siti Muthi'ah
Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
muthiahsiti294@gmail.com

Abstract

This study aims to identify problems with the accumulation of budget realization at the end of the year at IAIN Sultan Amai Gorontalo. The method used is a qualitative method. The analytical tool used in this research is thematic analysis. The method chosen to recruit informants was expert analysis. Data collection procedures in qualitative research include interviews and documentation. The results showed that there were three main points of discussion that led to a buildup in the realization of the expenditure budget at the end of the year at IAIN Sultan Amai Gorontalo, namely budget planning, budget execution, and the quality of human resources. Good planning includes the preparation of detailed activities and budgets, the absence of blocked budgets and the absence of additional budgets determines the timely withdrawal of funds. While good implementation will depend on good planning too, if a budget plan is well structured and of good quality, then the implementation will also run effectively and efficiently. Likewise with the quality of competent human resources is one of the factors in achieving an organizational goal.

Keywords: *Accumulation, Budget Realization, Good Planning*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dan direncanakan dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Optimalisasi anggaran harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*) dalam rangka pertanggungjawaban publik (Kennis, 1979 dalam Danepo 2013). Pada setiap organisasi publik dituntut agar dapat selalu memperhatikan *value for money*, dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat untuk selalu mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasil dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta (berhasil guna) dalam arti mencapai sasaran.

Permasalahan umum yang sering terjadi dalam belanja barang dan jasa pemerintah adalah pola penyerapan anggaran yang sering diistilahkan sebagai “*slow back-loaded expenditure*” atau realisasi anggaran tersendat-sendat. Pola ini adalah penyerapan yang memiliki pola penyerapan anggaran belanja rendah di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun dan meningkat secara signifikan di akhir tahun. Penyerapan anggaran yang rendah diawal tahun dapat memberikan dampak terhadap penumpukan penyerapan diakhir tahun atau di triwulan IV.

Permasalahan klasik yang kerap terjadi adalah kondisi di mana penyerapan anggaran rendah di awal tahun (triwulan awal) dan melonjak drastis di akhir tahun (Triwulan IV). Suatu anggaran dapat terserap secara merata, dengan kata lain penyerapan anggaran yang baik dilakukan secara maksimal pada triwulan-triwulan awal sehingga di triwulan akhir tidak kewalahan untuk melakukan penyerapan anggaran. Namun realita saat ini banyak sekali terjadi fenomena tidak terserapnya anggaran secara optimal sesuai batas ideal penyerapan anggaran per triwulan.

Fenomena ini juga terjadi di IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam penyerapan anggarannya, sebagaimana terlihat pada tabel data realisasi anggaran tahun 2022 berikut ini:

Data Realisasi Anggaran Tahun 2022		
Triwulan I	Januari	2.33
	Februari	10.69
	Maret	7.11
	Akumulasi	20.13
Triwulan II	April	8.30
	Mei	5.28
	Juni	6.90
	Akumulasi	20.48
Triwulan III	Juli	8.45
	Agustus	10.99
	September	7.97
	Akumulasi	27.41
Triwulan IV	Oktober	7.12
	November	11.06
	Desember	12.49
	Akumulasi	30.67
Realisasi		98.69

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada Triwulan IV memang terjadi penumpukan penyerapan anggaran yang ditunjukkan oleh besaran realisasi yang cenderung lebih besar

dibandingkan triwulan lainnya. Dengan terjadinya hal ini, dapat dikatakan bahwa civitas akademika di IAIN Sultan Amai Gorontalo belum dapat melaksanakan dan menikmati program layanan pendidikan secara maksimal.

Perencanaan dan pelaksanaan anggaran memiliki dampak terhadap peningkatan dan percepatan proses penyerapan anggaran pemerintah sehingga penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat dihindari. Adapun faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV ini sebagaimana telah diteliti sebelumnya. Faktor-faktor utamanya adalah perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa, yang telah diteliti oleh (Sanjaya, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dikemukakan oleh (Hendarti, 2021) yang menganalisis penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki dampak negatif, hal ini diakibatkan kekurangsiapan beberapa SKPD dalam melakukan perencanaan penyerapan anggaran kegiatan. Salah satu alasan dari SKPD yang memiliki tingkat penyerapan yang paling kecil yaitu adanya keterlambatan pemberkasan. Selain itu mereka lebih fokus pada penanganan COVID 19. Adanya pandemi COVID 19 menjadi faktor utama penghambat terealisasinya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan, sehingga menjadi menumpuknya anggaran yang sudah dianggarkan dari beberapa SKPD.

Adapun penelitian (Agustin dkk, 2022) yang menganalisis efektivitas penyerapan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2020 yaitu penyerapan anggaran yang rendah diawal tahun dapat memberikan dampak terhadap penumpukan penyerapan diakhir tahun atau di triwulan IV yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor perencanaan 4,9 %, faktor pelaksanaan sebesar 3,7%, faktor Sumber Daya Manusia sebesar 3,75 % dan faktor pengadaan barang jasa sebesar 3,66 %.

Dengan demikian penelitian serupa perlu dianalisis kembali di lingkungan organisasi publik lainnya. Penelitian ini mengambil objek di salah satu instansi pemerintah sektor pelayanan dan jasa di bidang pendidikan tinggi keagamaan islam negeri dibawah naungan Pendidikan Islam Kementerian Agama yang berstatus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dengan ini peneliti tertarik untuk menganalisis penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun 2022.

B. KAJIAN TEORI DAN TELAAH LITERATUR

1. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program. Anggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diberi masukan (Putra dkk, 2015). Anggaran merupakan sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi (Anthony dan Govindarajan, 2011)

Dapat disimpulkan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi. Anggaran sektor publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik untuk diberi kritikan atau pun masukan. Karena tujuan dari organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

2. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu (Halim, 2014).

Penyerapan anggaran adalah salah satu dari beberapa tahapan dalam siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran (Kuncoro, 2013).

Penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun berdampak terhadap terjadinya penumpukan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Hal tersebut terjadi akibat pelaksanaan kegiatan yang belum berjalan optimal. Pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan optimal tersebut menyebabkan inkonsistensi perangkat suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini kurang baik, karena saat ini penyerapan anggaran menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja suatu perangkat suatu organisasi. Karena kejadian ini sudah sering terjadi bahkan berulang setiap tahunnya, bisa dikatakan sebagai budaya organisasi karena kejadiannya terus berulang.

3. Perencanaan Anggaran dan Penumpukan Penyerapan Anggaran

Perencanaan program kerja dan kegiatan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan anggaran, sehingga program kerja dan kegiatan direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir, dan tidak adanya tambahan anggaran, sehingga semuanya sangat menentukan penarikan dana tepat waktu.

Perencanaan yang kurang baik dengan tidak menyusun skala prioritas perencanaan kegiatan akan menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran. Apabila telah dilakukan perencanaan anggaran dengan baik seharusnya sudah dapat menjamin anggaran tersebut dapat terserap secara optimal dan proposional selama rentang waktu satu periode anggaran. Penyerapan anggaran yang terkonsentrasi pada suatu waktu saja menunjukkan perencanaan anggaran yang tidak optimal. Perencanaan anggaran yang matang dan baik akan meminimalisir terjadinya penumpukan penyerapan anggaran karena dalam perencanaan anggaran yang baik ditentukan juga waktu kapan suatu pos anggaran tertentu harus dicairkan (Sudarwati dkk, 2017). Faktor perencanaan mempengaruhi terjadinya penumpukan penyerapan anggaran (Nugroho, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tematik analisis. Cara yang dipilih untuk merekrut informan yaitu *expert analysis*, data tersebut kemudian dianalisis secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diantaranya wawancara yaitu melakukan wawancara tatap muka dengan informan penelitian (*in direct interview*). Selanjutnya, dokumentasi yaitu penggunaan dokumen publik maupun laporan instansi dan informasi relevan lainnya.

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa informasi dari surat kabar maupun koran online, publikasi, dokumen realisasi anggaran, penerbitan SP2D dan data lain yang relevan. Data sekunder berupa realisasi belanja per bulan akan diolah untuk mencari pola pencairan dan penyerapan anggaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Anggaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo

Perencanaan merupakan instrumen yang membantu kita untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu (Nugroho dan Alfarisi, 2017). Pada tahun 2022 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memblokir penggunaan anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 5% dari pagu. Anggaran ini berasal dari program yang tidak prioritas. Pemblokiran anggaran tercantum pada halaman IV DIPA pada masing-masing satuan kerja, hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga atas penyebaran kasus covid-19. Seperti yang telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwa pemblokiran hanya bersifat sementara.

Blokir anggaran merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada semester-semester awal di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Sehingga anggaran yang terblokir dapat menghambat proses penyerapan anggaran yang menyebabkan terjadinya penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Selain blokir anggaran, adanya perencanaan anggaran yang tidak matang tentu akan sangat berpengaruh terhadap dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan atau sering disebut sebagai DIPA, hal ini dikarenakan oleh data administratif pendukung yang tidak lengkap seperti *Terms of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) serta data pendukung lainnya. Dimana anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. bawahan diserahkan sepenuhnya untuk menyusun anggaran yang akan dicapai di masa mendatang. Perencanaan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing fakultas, lembaga dan unit kerja belum dapat meningkatkan mutu perencanaan yang dapat menghasilkan perencanaan program, kegiatan dan penganggaran yang optimal sesuai skala prioritas.

Hal ini sejalan dengan pandangan Herriyanto mengemukakan bahwa realisasi penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan anggaran. Pemblokiran anggaran kegiatan dan revisi DIPA karena ketidaksesuaian antara alokasi pagu dan kebutuhan anggaran sangat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Selain itu, Murtini (2009) telah membuktikan bahwa faktor revisi dokumen pelaksanaan anggaran dan adanya tanda blokir berpengaruh terhadap rendahnya penyerapan realisasi anggaran pada Departemen Perindustrian Republik Indonesia periode tahun 2008.

2. Pelaksanaan Anggaran di IAIN Sultan Amai Gorontalo

Jika mengacu pada indikator pelaksanaan anggaran, IAIN Sultan Amai Gorontalo masih harus meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, kepatuhan terhadap POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), komitmen pejabat dalam menandatangani dokumen-dokumen, penggunaan anggaran berbasis kinerja, serta kedisiplinan instansi dalam mengikuti jadwal kegiatan yang sudah disusun. Terkait masalah disiplin, mekanisme penghargaan maupun hukuman bagi pihak yang berhasil dan gagal perlu ditegakkan (Miliasih, 2012 dalam Malahayati, Islahuddin, dan Basri, 2015).

Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi laju penyerapan anggaran adalah dokumen DIPA yang masih memerlukan revisi (Redaksi Media Keuangan, 2011). Ketidaktepatan dalam perencanaan atau penyusunan anggaran mengakibatkan perlunya tindakan revisi terhadap DIPA. Revisi DIPA ini akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena jadwal kegiatan harus diubah sehingga waktu pelaksanaan menjadi mundur dan akhirnya sisa anggaran yang tidak dapat lagi digunakan pada akhir tahun. Selain itu, jika dilakukan revisi maka kegiatan dan program belum dapat dilaksanakan sampai dengan persetujuan atas revisi turun. Bahkan ketika revisi DIPA dilakukan berulang kali, dapat menghambat proses penyerapan anggaran belanja.

Deslina mengemukakan bahwa perencanaan anggaran yang tidak berkualitas mengakibatkan dilakukan revisi DIPA. Revisi DIPA memerlukan waktu untuk dilaksanakan atau mengalami penundaan yang pada akhirnya mempengaruhi penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Akadira, 2010) bahwa revisi terhadap dokumen anggaran mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun penelitian oleh (Setyawan, 2016) Keterlambatan penyerapan anggaran belanja terjadi ketika satuan kerja harus melakukan Revisi DIPA karena adanya ketidaksesuaian antara anggaran kegiatan yang tercantum dalam RKA-KL dengan DIPA yang disahkan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di IAIN Sultan Amai Gorontalo

Sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi kelebihan tersendiri bagi organisasi pemerintah sekaligus sebagai pendukung daya saing pada era globalisasi dalam menghadapi lingkungan serta kondisi sosial masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dinamis (Putri, 2014). Sebaliknya, apabila suatu organisasi memiliki sumber daya manusia yang kurang kompeten akan berakibat pada menurunnya pencapaian tujuan organisasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Thoha dalam Sudasri, manusia adalah aktor utama dalam sebuah organisasi yang merupakan penggerak dari sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. SDM harus berkualitas, memiliki kemampuan atau kompetensi agar mereka dapat benar-benar membantu sebuah organisasi mencapai tujuannya, dalam hal ini adalah penyerapan anggaran. Oleh karena itu, jika ingin meningkatkan penyerapan anggaran secara merata atau mengurangi penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV, IAIN Sultan Amai Gorontalo perlu melakukan perbaikan pada faktor SDM ini.

Adapun unit penanggung jawab kegiatan serta beberapa sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan dan anggaran, tetapi kurang paham dan kurang kompeten mengenai pengelolaan keuangan. Kurang kompetennya pejabat pengelola keuangan mengenai pengelolaan keuangan ini yang terkadang dapat menyebabkan proses administrasi keuangan menjadi terhambat. SDM yang kompeten mengetahui dengan baik proses perencanaan yang sesuai dan matang serta mengetahui bagaimana kondisi di lapangan sehingga dia akan melakukan perencanaan anggaran dan menyesuaikannya dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga kendala-kendala dalam pelaksanaan anggaran dapat diminimalisir. Tentunya hal ini didukung dengan latar belakang pendidikan, keikutsertaan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengalaman di bidang keuangan.

Zarinah, Darwanis, dan Abdullah mengemukakan bahwa kualitas SDM yang dalam hal ini adalah Aparat Sipil Negara (ASN) sebagai aparat pengelola keuangan menjadi faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Utomo mengemukakan upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, dan produktivitas. Upaya penataan SDM, khususnya pada sektor publik agar lebih baik lagi juga dapat dilakukan melalui perbaikan penghasilan/remunerasi.

Untuk tidak bertumpuknya realisasi anggaran akhir tahun di IAIN Sultan Amai Gorontalo, maka perlu diperhatikan antara lain:

- a. Dalam perencanaan anggaran, harus dilakukan dengan tepat dan matang, perlu melakukan perencanaan anggaran secara lebih baik dengan meningkatkan indikator-indikator perencanaan anggaran yang saat ini masih belum maksimal. Di antaranya dengan mengalokasikan anggaran untuk setiap program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas secara efektif, efisien dan dapat diukur hasilnya serta melengkapi data dukung seperti *Term of Reference* (TOR) dan menyesuaikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan standar biaya masukan;

- b. Dalam pelaksanaan anggaran, perlu memperhatikan prosedur dan aturan teknis revisi DIPA bagi setiap unit kerja yang ingin melakukan revisi anggaran. Hal ini perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi agar tidak menghambat proses penyerapan anggaran.
- c. Dalam meningkatkan kualitas SDM dengan cara pelatihan secara rutin, mengikuti bimtek secara rutin, dan memahami aturan serta prosedur mengenai perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini dilakukan sebagai persiapan pegawai sebelum mutasi, rotasi, dan pengganti pensiunan agar pegawai tersebut sudah tidak kebingungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di tempat barunya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga pokok pembahasan yang menyebabkan penumpukan realisasi anggaran belanja di akhir tahun IAIN Sultan Amai Gorontalo, yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan kualitas sumber daya manusia. Perencanaan yang baik meliputi penyusunan kegiatan dan anggaran yang detail, tidak adanya anggaran yang diblokir serta tidak adanya tambahan anggaran sangat menentukan penarikan dana tepat waktu. Sedangkan Pelaksanaan yang baik akan sangat tergantung pada sebuah perencanaan yang baik pula, jika suatu perencanaan anggaran tersusun dengan baik dan berkualitas, maka dalam pelaksanaannya juga akan berjalan dengan efektif dan efisien. Begitupun dengan kualitas sumber daya manusia yang kompeten merupakan salah satu faktor dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Suwardi, dan Adi Purwanto. 2022. Efektifitas Penyerapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 11 (2): 2355-4223
- Akadira, Tora. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia
- Anthony dan Govindarajan. 2011. *Management Control System: Sistem Pengendalian Manajemen*. Buku Dua. Terjemahan Kurniawan Cakrawala, Jakarta: Salemba Empat
- C. Malahayati, Islahuddin and H. Basri. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*. 4 (11-19)

- Danepo, Muhammad. 2013. Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajemen Publik Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Objek Penelitian pada SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota seProvinsi Lampung
- D. Sudasri. 2016. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran. Fakultas Ekonomi. pp. 1-22
- Halim, A. 2014. Manajemen Keuangan Sector Public Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah, Salemba Empat: Jakarta
- Kuncoro, M. 2013. Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyani, Hendarti Tri Setyo. 2021. Analisis Penumpukan Pencairan Anggaran Pada Akhir Tahun 2020 di rovinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal Of Accounting and Business*. DOI:10.33019/ijab.v3i1.32
- Murtini. 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Realisasi Anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia Periode 2008. Tesis. Jakarta: Universitas Bina Nusantara. Online. (<http://thesis.binus.ac.id>), diakses tanggal 9 Februari 2012.
- Putri, C. T. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Universitas Bengkulu.
- Redaksi Media Keuangan. 2011. Realisasi Penyerapan Anggaran Capai 56,51 Persen. Media Keuangan Vol. VI No. 50
- R. Nugroho and S. Alfarisi. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal IV Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK*, vol. 10, pp. 22-37
- Setyawan, A. 2016. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Pembayaran KPPN Bojonegoro Tahun Anggaran 2015. Unpublished Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. 2017. Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja di Akhir Tahun (Studi Kasus pada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"* 8 (1) 129-138. doi: 10.35800/jjs.v8i1.15332
- T. Sanjaya, 2018. Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Fakultas Ekonomi.
- Zarinah, Darwanis, dan Abdullah. 2016. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. 5 (1) 2302-0164